

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FESTIVAL TABOT  
DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**FADLURRAHMAN  
NPM. D1D009059**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2013**

*Motto :*

- ❖ *Adapun orang-orang yang berjihad (mempersungguh) di dalam urusanKu maka akan Aku (Allah) tunjukkan jalanKu pada mereka, sesungguhnya Allah niscaya beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-ankabut 69).*
- ❖ *Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat. (H.R Bukhari dan Muslim).*
- ❖ *Hidup hanya persinggahan sementara untuk yang bernyawa. Selama masih mempunyai akal dan fikiran, pergunakanlah sebaik-baiknya sebagai amalan di hari penentuan (Romli S.A)*
- ❖ *Siapa yang mencoba, maka terjadilah. Siapa yang berkehendak, maka tercapailah. Dan, siapa yang mencinta, maka hiduplah. (Anne McCaffrey).*
- ❖ *Tersenyum adalah cara termudah menunjukkan siapa anda tanpa bicara (Fadlurrahman)*

*Dengan segenap rasa syukur atas karunia Allah SWT yang tulus dari dalam lubuk hati, kupersembahkan hasil perjuanganku untuk orang yang kucintai dan mencintai*

- ❖ *Keluarga besarku terutama Umi dan Buya tercinta dan tersayang yang selalu memberi dukungan, bantuan moril maupun materil khususnya serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk ananda. Uda'ku Habib, Arif, Uniku Amel, Ama, 'Ayun adikku Diyak, Serta empat keponakanku Raffia, Qiran, Agha dan Nabiel. Terima kasih keluargaku, kalian mendukungku dan memberikan semangat serta do'a dan kasih sayang untukku.*
- ❖ *Teman satu kosku Richardo, Oscar, Santok, Boni, Remon, Enda, Tono, Valen dan Zey yang selalu memberikan dukungan di setiap pertemuan.*
- ❖ *Keluarga COSMIPku yang tercinta. Angkatanku 2009 Ferdy, Liona, Ella, Ice, Anggi, Vero, Bang Agus, Agru, Dyas, Neni, Khenza dan Helena. Adikku yang turut membantu Noval, Bom-bom, Bagus, Aris, Ook, Dwik, Inong, Heni, Ucek, Saska, Gilang, Ayu, Yesi, Mardy, Inan, Tri', Rafsan, Nyayu, Billy, Bayu, Rikky, Riko. Abang-abangku yang memberikan motivasi kepadaku Bang Dedi, Bang Ferry, Bang Rino, Bang Hendrik, Bang Irsan. Serta semua keluarga COSMIP yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saudaraku atas semua kegembiraan dan kesedihan yang kita rasakan bersama..*
- ❖ *Almamaterku yang memberikan dampak untuk masa depanku.*
- ❖ *Kaum hawa yang pernah maupun yang akan singgah di hatiku kelak. Terima kasih telah menemani hari-hariku di saat tak ada gairah untuk berfikir.*
- ❖ *Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam kelengkapan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya selama ini.*

## RIWAYAT PENULIS



Fadlurrahman lahir di Kota Palembang, pada tanggal 2 Januari 1992. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Romli S.a dan Fathiyah. Penulis yang biasa disapa Aman ini menyelesaikan pendidikannya di SD Muhammadiyah 14 Kota Palembang pada tahun 2003, SMP Negeri 19 Kota Palembang pada tahun 2006 dan SMA Muhammadiyah 1 Kota Palembang pada tahun

2009. Setelah lulus SMA pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Universitas Bengkulu pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik melalui jalur SNMPTN.

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMA-ADMIRA) UNIB
2. Anggota Komunitas Seni Mahasiswa Fisip (COSMIP) UNIB
3. Presidium dua Musyawarah Besar COSMIP UNIB tahun 2012
4. Panitia Tradisi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (TAMAN) tahun 2010
5. Panitia kegiatan Kampoeng Seni Komunitas Seni Mahasiswa FISIP (COSMIP) tahun 2009

### **Kegiatan dan Pelatihan Keorganisasian**

1. Peserta Pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Tingkat Universitas Bengkulu, tahun 2009
2. Peserta Pada Kegiatan Perkenalan Mahasiswa Baru (MAPAWARU) FISIP UNIB, tahun 2009
3. Peserta Keakrab-AN Hima Admira FISIP UNIB tahun 2009
4. Peserta kegiatan Tradisi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (TAMAN) di Desa Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, tahun 2009.
5. Peserta Pada Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) Hima Admira FISIP UNIB, tahun 2009
6. Peserta Pada Seminar Daerah “Implementasi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, di Hotel Horizon Bengkulu, Tahun 2009.
7. Moderator Pada Penerimaan Anggota Baru (PAB) COSMIP tahun 2010

### **KKN, Magang dan Penelitian Lapangan**

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 67 di desa Air Pandan Bengkulu Utara 1-31 Agustus tahun 2012
2. Magang di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bengkulu, 5 September-5 November tahun 2012
3. Penelitian Mata Kuliah Analisis Sosial di Kecamatan Malabro Kota Bengkulu tahun 2012
4. Survey lapangan *Quick Count* LSI di Kabupaten Muara Enim tahun 2012

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kupanjatkan syukur ke hadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Kebijakan Festival Tabot Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu**". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata I (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga besarku.
2. Bapak Drs. Hasan Pribadi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu
3. Bapak Drs. Jarto Tarigan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu
4. Bapak Drs. Djonet Santoso, M.A selaku pembimbing utama yang tanpa lelah memberikan dorongan, masukan dan solusi kepada penulis

5. Bapak Drs. Lipneldi M.Si selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kritik saran bagi kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak Drs. Mirza Yasben, M.Sc dan Ibu Dra. Loesida Roeliana, M.Si selaku penguji disetiap ujian skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, dukungan dan motivasi untuk penulis
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Civitas Akademika FISIP UNIB
8. Seluruh Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu (DPPKA) yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi
9. Keluarga Kerukunan Tabot Kota Bengkulu (KKT) yang telah bersedia memberikan waktunya untuk berbincang-bincang dengan penulis
10. Serta seluruh masyarakat Kota Bengkulu yang telah bersedia membantu penulis dalam melengkapi penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagai akibat dari keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun demikian penulis sangat merasakan bahwa ini menjadi pembelajaran dan pendorong untuk dapat melangkah lebih maju dalam menggali ilmu pengetahuan lebih lanjut. Untuk itu, penulis memohon maaf serta mengharapkan kritikan dan saran sebesar-

besarnya yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bengkulu, November 2013

**Fadlurrahman**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FESTIVAL TABOT DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BENGKULU**

**Fadlurrahman**  
**D1D009059**

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada efektivitas kebijakan Festival Tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Festival Tabot terhadap pembangunan Kota Bengkulu baik itu bersifat fisik maupun non fisik sehingga perlu di danai dari APBD Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sasaran penelitian diambil dengan teknik *snowball sampling* yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, 6 orang diantaranya adalah pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 5 orang pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, 1 orang dari Keluarga Kerukunan Tabot (KKT) Kota Bengkulu dan 3 orang masyarakat Kampung Cina Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua kegiatan pada saat Festival Tabot. Pertama acara ritual tabot yang bersifat sakral dan wajib dilaksanakan dan kedua acara festival yang bersifat meramaikan. Maksud meramaikan disini yaitu memeriahkan kegiatan ritual yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan festival dengan tujuan menarik kunjungan wisatawan lokal maupun asing. Dana kedua kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Bengkulu itu sendiri. Kebijakan festival tabot Kota Bengkulu memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan dan terjadi perputaran uang pada saat perayaan festival tabot. Kemudian festival tabot memberikan masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan tenda berjalan dan retribusi parkir kendaraan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Efektivitas Kebijakan Festival Tabot Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu .....	13
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	13
2.2 Kebijakan Pemerintah .....	17
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	17
2.3 Festival Tabot .....	21
2.3.1 Pengertian Festival .....	21
2.3.2 Tabot .....	22
2.4 Tinjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	24
2.4.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	26
2.4.2 Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	27
2.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.4.2.2 Dana Perimbangan .....	28
2.4.2.3 Lain-lain Pendapatan .....	29
2.4.2.4 Belanja Daerah .....	29
2.4.2.5 Pembiayaan Daerah .....	30
2.4.3 Prinsip-prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	31

<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Aspek Penelitian .....	34
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Teknik Pemilihan Informan .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Singkat Kota Bengkulu .....	42
4.1.1 Topografi .....	45
4.1.2 Keadaan Kependudukan .....	45
4.1.3 Angkatan Kerja .....	47
4.1.4 Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Bengkulu .....	49
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Karakteristik Informan .....	51
5.1.1 Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin .....	52
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Peran/Jabatan .....	53
5.2 Hasil Penelitian .....	55
5.2.1 Pelestarian Wisata Budaya .....	56
5.2.2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .....	60
5.2.3 Sarana Promosi Potensi Pariwisata Budaya .....	62
5.2.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	66
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	70
6.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Hubungan Efektivitas .....	15
Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik .....	21
Gambar 3. Komposisi Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2011 .....	46
Gambar 4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Bengkulu Tahun 2011 .....	47
Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bengkulu Tahun 2011 .....	48

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Anggaran APBD Festival Tabot Kota Bengkulu Tahun 2010-2012 .....	8
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Festival Tabot Kota Bengkulu Tahun 2011-2012 .....	9
Tabel 3.1. Desain Penelitian .....	34
Tabel 3.2. Aspek-aspek Penelitian .....	35
Tabel 4.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Bengkulu .....	44
Tabel 4.1.2. Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Bengkulu .....	45
Tabel 5.1.1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Tabel 5.1.2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel 5.1.3. Identitas Informan Berdasarkan Peran/Jabatan .....	53
Tabel 5.2.3. Perkembangan Jumlah Wisatawan ke Kota Bengkulu Tahun 2007- 2011 .....	66
Tabel 5.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Festival Tabot Kota Bengkulu tahun 2011-2012 .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2. Foto Penelitian
- Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal
- Lampiran 4. Lembar Persetujuan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)  
Provinsi Bengkulu
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi  
Bengkulu
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)  
Provinsi Bengkulu
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T)  
Kota Bengkulu
- Lampiran 9. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Belanja Barang dan Jasa  
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Pagelaran  
Seni dan Budaya Daerah)
- Lampiran 10. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 207 Tahun 2013 Tentang  
Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Festival dan Perayaan Tabut  
Kota Bengkulu Tahun 2013

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat demi kesejahteraan bangsa.

Di bentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah dibentuk untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tujuan bersama. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan. Pemerintah, memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktifitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dewasa ini otonomi daerah merupakan hal yang penting. Keberadaan pemerintahan daerah dalam pemerintahan

nasional dapat dijumpai pada setiap negara. Sebagai salah satu formula yang telah lama diajukan oleh para ahli ilmu sosial khususnya dalam administrasi pembangunan guna merespon permasalahan ditingkat lokal adalah dengan melakukan desentralisasi. Keadaan tersebut berimbas pula pada perubahan dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sehingga dilakukan revisi pada Oktober 2004 melalui UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (sebagai revisi UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999), pemerintah dituntut semakin kreatif dalam menggali potensi daerahnya untuk dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk didalamnya adalah potensi pariwisata. Penetapan otonomi daerah memberikan konsekuensi logis bagi daerah untuk mampu dan mengurus rumah tangga sendiri, dan memiliki tanggung jawab yang intens terhadap kemakmuran rakyatnya melalui kegiatan pembangunan, (dalam Wibawa, 2005:43).

Dalam melaksanakan otonomi daerah dalam prinsip desentralisasi tentunya memerlukan pendanaan yang cukup banyak karena dalam otonomi dituntut kemandirian. Persoalan yang klasik yang selalu muncul ketika membicarakan masalah pemerintahan daerah adalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat, hanya sebagian kecil yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri maka kepala daerah perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepala daerah diberikan keleluasan

untuk menggali sumber potensial yang ada didaerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, (dalam Wibawa, 2005:65).

Terciptanya kondisi perekonomian yang baik, maka pemerintah bersama dengan masyarakat berusaha melalui berbagai bidang usaha. Salah satu usaha tersebut ialah pengembangan kebudayaan daerah atau seni budaya daerah agar dapat menjadi atraksi wisata yang mampu menarik minat kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik sehingga dapat memperkenalkan kebudayaan daerah tersebut sekaligus melestarikan warisan sejarah serta meningkatkan pendapatan negara (devisa).

Salah satu cara untuk meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan daya tarik wisata adalah melalui pentas seni dan budaya yang disajikan dengan menarik untuk ditampilkan kepada wisatawan. Untuk itu perlu diadakan pembinaan seni dan budaya mutlak dilakukan agar seni dan budaya Indonesia dapat dikenal oleh dunia internasional. Pengembangan daya tarik wisata ini penting dilakukan mengingat banyaknya kesenian dan budaya yang melimpah ruah di tanah air kita.

Untuk melakukan pengembangan dan pelestarian budaya itu pun memerlukan dana. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. Kemudian dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Di Indonesia terdapat Pulau Bali yang disebut sebagai surga pariwisata. Anggapan tersebut dibangun atas wacana orientalis yang ingin melihat Bali sebagai museum hidup budaya Hindu-Jawa, kantong beragama Hindu ditengah negeri Islam terbesar di dunia, (dalam Michel Picard, 2006 : 15). Masyarakat Bali memandang dirinya sebagai pewaris kebudayaan Hindu yang telah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga mereka dari Jawa, (dalam Michel Picard, 2006 :16). Ini berarti pemerintah daerah pulau Bali dapat memanfaatkan peninggalan-peninggalan berupa kebudayaan yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai penarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Adapun salah satu kebudayaan yang saat ini dilestarikan oleh pemerintah dan masyarakat Bali yaitu berupa tari-tarian. Tari-tarian tersebut ditampilkan secara umum kepada wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Bali sangat tepat sasaran. Terbukti setiap tahunnya peningkatan kunjungan wisata terjadi di pulau Bali.

Seperti halnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat berniat menggenjot Pendapatan Asli Daerah dari sektor seni dan budaya. Kepala Disbudpar Idjhudin Budhayana mengatakan, bahwa :

“Saat ini sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata seni dan budaya masih tertinggal dengan wisata alam. Padahal, potensi untuk menggali berbagai keunggulan dari sektor ini sangat besar. Jika tidak dikembangkan dan dikelola secara serius, dikhawatirkan potensi ini lambat laun akan hilang. Kita akan mencoba menggenjot wisata seni dan budaya Jawa Barat”, (www.okezone.com).

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, Pulau Bali telah memanfaatkan kekayaan seni budaya yang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Jawa Barat masih berusaha memaksimalkan wisata seni untuk menarik minat wisatawan. Seperti yang diketahui, wisatawan mancanegara selalu tertarik terhadap sesuatu yang berhubungan dengan budaya asli daerah . Oleh karena itu sangat diperlukan promosi terhadap seni dan budaya suatu daerah melalui media massa karena bukan hanya wisatawan domestik saja yang menjadi target pemerintah saat ini, tetapi wisatawan mancanegarapun diharapkan bisa tertarik terhadap seni dan budaya yang dipasarkan.

Pada tahun 1991 Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata ke-25 di Indonesia (Dinas Pariwisata, 2012). Provinsi Bengkulu yang beribu kota di Kota Bengkulu dengan luas 14.452 Ha merupakan provinsi yang berpotensi dibidang kepariwisataan yang cukup besar. Saat ini terdapat salah satu objek wisata budaya di Kota Bengkulu yakni Tabot. Tabot merupakan suatu upacara sakral yang dilakukan oleh orang-orang garis keturunan pembuat Tabot.

Upacara Tabot setiap tahunnya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram tahun Hijriyah. Tabot digelar untuk mengenang peristiwa tragis yang menimpa Hasan Husein (cucu Nabi Muhammad SAW). Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 84 Tahun 1999 (84/1999) Tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya Presiden Republik Indonesia, menimbang :

- a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

Berdasarkan KEPRES Nomor 84 Tahun 1999 tersebut, upacara tabot kiranya penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu. Selama diadakannya ritual tabot dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram tahun Hijriyah, pemerintah daerah Kota Bengkulu menggelar sebuah festival yang dinamai dengan festival tabot. Festival tersebut diadakan setelah melakukan upacara sakral tabot yang berupa pengambilan tanah Tapak Paderi dan dilakukan pembuangan tabot di Padang Karbela, sekitar tiga kilometer dari lokasi festival tabot. Kadin Perhubungan Komunikasi dan Informatika Eko Agustrianto, seperti yang dilansir ANTARA Bengkulu (Rabu, 7/11/2012), dikatakannya, “Seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu akan berperan maksimal untuk mensukseskan agenda tahunan ini.”

Festival yang akan diadakan pada tanggal 1-10 Muharram tersebut memang diharapkan mampu untuk mengangkat khazanah budaya dan pariwisata di Kota Bengkulu. (<http://www.arahmah.com/read/2012/11/27/25075- pesta-kematian-padang-karbala.html>, diakses tanggal 14-06-2013).

Selanjutnya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perayaan festival tabot, lingkup kegiatan pelaksanaan festival tabot meliputi : (1). Pelaksanaan kegiatan

ritual tabot; (2) Pelaksanaan dan bazar/pasar rakyat; (3) Pelaksanaan kegiatan festival dan lomba. Kemudian festival tabot memiliki tujuan diantaranya :

1. Melestarikan wisata budaya tabot berdasarkan nilai-nilai, adat istiadat serta kebiasaan yang luhur dan berkelanjutan.
2. Menjadikan pariwisata Kota Bengkulu sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan
3. Sebagai sarana promosi potensi pariwisata budaya
4. Sebagai salah satu sumber penghasil devisa bagi pembangunan di Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012, pendanaan festival tabot masuk dalam Pasal 3 tentang belanja langsung dan ayat 2 poin (d) yaitu mengenai belanja hibah. Kebijakan pendanaan perayaan festival tabot dibentuk berdasarkan usulan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu semenjak festival tabot ditetapkan sebagai destinasi pariwisata dalam kalender pariwisata nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perayaan festival tabot yang mana anggaran festival tabot berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Kemudian usulan tersebut dilanjutkan ke satuan tiga yaitu Bappeda, Biro keuangan dan Biro Pembangunan kemudian disahkan oleh DPRD Komisi IV. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan festival tabot dengan membentuk tim-tim dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan SKPD Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, Walikota Bengkulu mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pembentukan panitia penyelenggaraan festival dan perayaan tabot Kota Bengkulu guna mensukseskan perayaan festival tabot.

Perayaan festival tabot tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu setiap tahunnya. Melalui kegiatan tersebut pemerintah daerah Kota Bengkulu berupaya menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perayaan festival tabot yang didapat dari penyewaan tenda yang disewakan kepada para pedagang dan retribusi parkir. Berikut tabel mengenai pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu untuk kegiatan festival tabot tiga tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Festival Tabot**  
**Kota Bengkulu**  
**Tahun 2010-2012**

No.	Tahun	Sumber	Besar Anggaran
1.	2010	APBD Kota Bengkulu	Rp. 600.000.000,-
2.	2011	APBD Kota Bengkulu	Rp. 400.000.000,-
3.	2012	APBD Kota Bengkulu	Rp. 400.000.000,-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 2012

Pada tahun 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kegiatan festival tabot sebesar Rp. 600.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kegiatan festival tabot menurun menjadi Rp. 400.000.000,-. Dan pada tahun 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kegiatan festival tabot sebesar Rp. 400.000.000,-. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiga tahun terakhir tersebut, alokasi dana perayaan festival tabot selalu menembus angka ratusan juta rupiah.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyatakan sebelumnya bahwa perayaan festival tabot dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan

tenda dan retribusi parkir. Berikut data tabel mengenai pendapatan yang dihasilkan selama berlangsungnya festival tabot dua tahun terakhir :

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Festival Tabot Kota Bengkulu**  
**tahun 2011-2012**

No.	Sumber	Tahun	
		2011	2012
1.	Dewan Asyura	Rp. 50.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	SPSI	-	Rp. 50.000.000,-
3.	Retribusi Parkir	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 64.000.000,-</b>	<b>Rp. 164.000.000,-</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, 2012

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga sumber pendapatan yang dihasilkan selama berlangsungnya festival tabot. Sumber dana tersebut didapat dari penyewaan tenda-tenda dan lapak-lapak yang disiapkan oleh Event Organizer (EO) Dewan Asyura dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan juga retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Pada tahun 2011 Event Organizer (EO) Dewan Asyura membayarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan retribusi parkir yang dihasilkan sebesar Rp. 14.000.000,-. Jadi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Festival Tabot pada tahun 2011 sebesar Rp. 64.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2012 Event Organizer (EO) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ikut ambil bagian dalam penyewaan tenda-tenda dan membayarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,-, Dewan Asyura membayarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan retribusi parkir yang dihasilkan sebesar Rp. 14.000.000,-. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Festival Tabot pada tahun 2012

sebesar Rp. 164.000.000,-. Berdasarkan data tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari tahun 2011-2012 meningkat tiga kali lipat.

Pada umumnya, dana dari setiap kegiatan yang diselenggarakan suatu daerah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kegiatan festival tabot terbilang besar setiap tahunnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di hasilkan sangat kecil dibandingkan pengeluaran biaya pelaksanaan. Disini terlihat adanya pemborosan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun untuk perayaan festival tabot yang bisa berdampak pada perkembangan Kota Bengkulu. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih tetap menjalankan kebijakan perayaan festival tabot dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan perayaan festival tabot rawan terjadi tindak korupsi seperti pemberitaan di media mengenai laporan dana kegiatan festival tabot Kota Bengkulu tahun 2012 tentang adanya tindak korupsi yang di lakukan oleh salah satu oknum menyebabkan kerugian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu membentuk kebijakan perayaan festival tabot dengan tujuan memperkenalkan budaya yang ada di Kota Bengkulu sehingga dapat menarik perhatian Investor di bidang pariwisata untuk membentuk kerjasama. Tetapi pada kenyataannya sangat minim Investor yang mau menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dan menganalisis efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Perayaan festival tabot secara langsung mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu setiap tahunnya, ini memberikan gambaran umum kepada masyarakat luas mengenai dampak positif dan negatif kegiatan festival tabot terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Yang menjadi persoalan saat ini mampukah kepala daerah beserta dinas terkait selaku aparatur pemerintah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka melestarikan seni dan budaya dan meminimalisir pengeluaran perbelanjaan daerah. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk memfokuskan dan mengambil judul penelitian **”Efektivitas Kebijakan Festival Tabot Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian yaitu “Bagaimana efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bengkulu?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bengkulu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan penggunaan dana APBD untuk pengembangan seni budaya yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan bagi peneliti lain yang mengkaji bidang yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan input atau masukan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu bahwa penggunaan APBD dapat diminimalisir untuk pengembangan kebudayaan suatu daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Efektivitas Kebijakan Festival Tabot Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu tingkatan atau ukuran keberhasilan suatu tindakan atau usaha yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kamarudin (dalam Ruswati 2005 :14), “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan dalam mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya”. Selanjutnya Winardi (dalam Nurhayati 2005:29) mengatakan “istilah efektivitas terbentuk menunjukkan pada suatu tindakan dimana suatu tindakan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Emerson (dalam Nurhayati, 2005:30-31) mengatakan “Efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, Peter Drucker (dalam Handoko, 2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Kemudian menurut Mahsun (dalam Ismi dwi astuti nurhaeni dkk, 2011:75) menjelaskan bahwa efektivitas ( hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu kebijakan.

Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Di dalam Wikipedia Indonesia, Drucker (1999:12) mengatakan bahwa, “Menjalankan pekerjaan yang efektif, maka efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapainya tujuan sesuatu yang telah ditetapkan hasil yang mendekati sasaran semakin tinggi efektivitasnya” ([www.wikipediaIndonesia.com](http://www.wikipediaIndonesia.com), diakses pada tanggal 24 Oktober 2013). Selanjutnya menurut Handayadiningrat (dalam Nurhayati, 2005:31) mengatakan bahwa “Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila sasaran telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya maka kegiatan itu dikatakan efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka dikatakan tidak efektif”.

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai ukuran untuk pencapaian suatu tugas dan tujuan. Efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Jelasnya apabila sasaran telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya maka efektivitas tercapai dan sebaliknya apabila tujuan atau sasaran itu tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif. Literatur lain menggambarkan tingkat efektivitas yaitu menurut Soekarno K. (dalam Anonim :2005) efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan/digunakan. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang

dikehendaki dan juga penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Realisasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari *input*, *throughput* dan *output*. Umumnya teori efektivitas masih terkait dengan targetan dan tujuan organisasi, walaupun indikator penilaian pencapaian target tersebut berbeda-beda. Steers mengungkapkan :

“Makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi” (Richard Steers, 1985:2).

Sama halnya dengan pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (dalam Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

**Gambar 1**  
**Hubungan Efektivitas**

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber : Mahmudi, 2005:92

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil dan tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang mendefenisikan efektivitas sebagai berikut, efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan (Moenir, 2006:166).

Jadi efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat. Efektivitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila tujuan instansi tersebut dapat dicapai maka dapat disebut efektif. Efektivitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan keberhasilan dari suatu kegiatan yang sesuai dengan program, rencana dan tujuan yang telah ditentukan serta kegiatan tersebut menimbulkan efek bilamana pekerjaan tersebut tepat dan sesuai dengan kehendak yang diinginkan.

## 2.2 Kebijakan Pemerintah

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektivitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai *output* yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam. Menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sementara itu menurut Carl Frederich (dalam Wahab, 1997:2), menyatakan :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Anderson (dalam Islamy, 2004:2) merumuskan “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”. Dan menurut Raksasataya (dalam islamy, 2004:17) mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sejalan pendapat pakar diatas Friedrich (dalam Winarno 2005:15) mengatakan kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. (dalam Winarno 2005:18)

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitz (dalam Thoha, 1992:58) mengemukakan : "*Policy* dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 1997:2) mengartikan "Kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak". Selanjutnya Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2002:19) melihat "Kebijakan sebagai sarana untuk

mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan tertentu”.

Kemudian Charles O. Jones (dalam Wahab 1997:5) mengungkapkan bahwa kebijakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Sementara itu menurut Reymond A. Bauer (dalam Dunn, 1999:1) menyatakan “Dengan mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat “diperbaiki”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan dan diikuti oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah tertentu. Sementara itu berbicara tentang kebijakan negara (pemerintah), W.I. Jenkins (dalam Wahab, 1997:4) menyatakan “Kebijakan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas wewenang dari para aktor tersebut”.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (dalam Abidin, 2002:18) menyebutkan, “kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Sejalan dengan Dye, George C. Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Islamy, 2004:18), mengatakan “Kebijakan negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

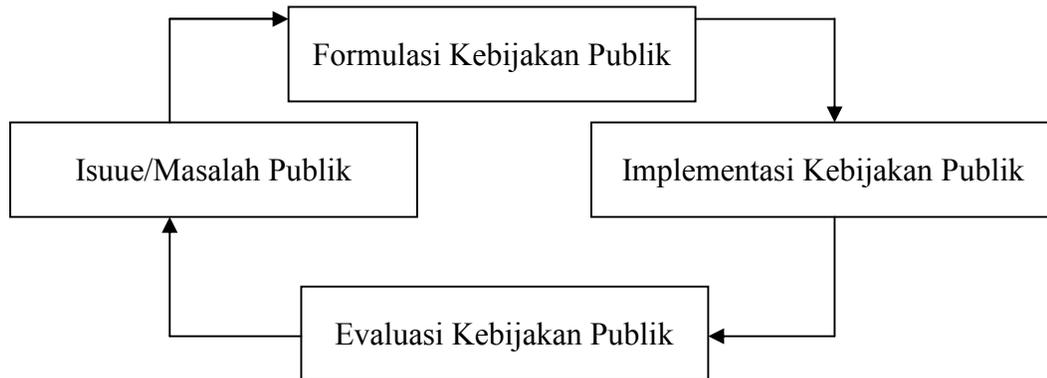
Selanjutnya Anderson (dalam Islamy, 2004:19) mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan negara ini menurut beliau adalah :

1. Kebijakan negara selalu mempunyai tujuan tertentu
2. Kebijakan negara bersi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah
4. Kebijakan negara bisa berbentuk positif dan bisa juga berbentuk negatif
5. Kebijakan negara dalam bentuk positif berbentuk memaksa.

Howlett dan Ramesh (dalam Wahab, 1997:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut : (1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; (2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan; (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; dan (5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:3) dari sudut manajemen proses pembuatan kebijakan dapat dipandang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak kelompok kegiatan utama, yaitu (1) formulasi kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2**  
**Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik**



*Sumber : Mustopadidjaja (2002:3)*

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan disusun sebagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pembangunan.

## **2.3 Festival Tabot**

### **2.3.1 Pengertian Festival**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, festival merupakan suku kata yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Festa*” atau dalam bahasa Indonesia adalah pesta. Pada umumnya, festival merupakan sebuah perayaan besar yang diselenggarakan

secara periodik sekali setahun dengan tujuan untuk memperingati sesuatu. Festival dapat diadakan pada berbagai peristiwa seperti penghormatan, perayaan keagamaan, perayaan panen awal musim, dan perayaan peristiwa sejarah (www.wikipedia.com, diakses pada 24 Oktober 2013).

Sedangkan menurut Falassi (1987) di dalam kata pengantar pada bukunya yang berjudul "*Time Out of Time : Essay on The Festival*" : *Festival is an event, a social phenomenon, encountered in vitually all human cultures* (Festival adalah suatu peristiwa atau kejadian penting, suatu fenomena sosial yang pada hakekatnya dijumpai dalam kebudayaan manusia). Lanjut Falassi (1987, 2) peristiwa-peristiwa yang dapat digolongkan sebagai festival adalah sebagai berikut :

1. Suatu perayaan yang bersifat suci (keagamaan) atau yang bersifat keduniawian ditandai dengan adanya suatu perayaan khusus.
2. Perayaan tahunan yang memperingati seseorang yang penting atau suatu peristiwa besar atau juga perayaan hasil panen dari produk yang penting.
3. Suatu kegiatan budaya yang terdiri dari serangkaian pertunjukan dari suatu karya dalam kesenian yang indah dan seringkali dipersembahkan untuk artis tunggal atau juga suatu aliran tertentu.
4. Pameran secara berkala atau pekan raya.
5. Kegembiraan umum, keramahtamahan dan kebahagiaan.  
(www.fairuz007.blogspot.com, diakses pada 20 Oktober 2013)

### **2.3.2 Tabot**

Tabot merupakan upacara tradisional yang bernafaskan Islam. Tabot sarat dengan ritual keagamaan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir upacara tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Sejumlah syarat dan pantangan harus dijaga ketat oleh kelompok-kelompok pelaksana atau keturunan keluarga tabot. Tabot juga syarat dengan simbol-simbol religius yang mengandung makna yang dalam.

Kata tabot berasal dari bahasa Arab “*At-tabiti*” yang berarti peti yang terbuat dari kayu. Dalam Al-Quran terdapat cerita tabot orang Yahudi, yaitu suatu peti wasiat tempat menyimpan kitab Taurat, (dalam Harapandi Dahri, 2009:76). Menurut keterangan ketua kerukunan keluarga tabot, Ir. A. Syafril Syah, tabot berasal dari Jazirah Arab atau persisnya di daerah Irak sekarang. Istilah tabot sebenarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun yang berarti kotak.

Secara lebih luas, tabot dimaknai untuk mendramatisasikan sebuah perebutan kekuasaan uang tidak seimbang. Dari sinilah muncul tabot dalam bentuk lain, sebagai cara mengenang peristiwa tragis gugurnya Husain Ali bin Abi Thalib cucu Nabi Muhammad S.A.W. di Padang Karbala Iraq pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriyah (681) Masehi.

Selanjutnya budaya tabot itu dibawa ke daerah-daerah yang disinggahi dari Jazirah Arab seiring dengan masa penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Budaya tabot terus masuk ke Punjab, India. Lalu dari India budaya tabot dibawa ke Bengkulu pada tahun 1685 Masehi. Mereka yang mendarat di Bengkulu berjumlah tiga belas orang. Diantara mereka tercatat nama Maulana Ichsad, Imam Sobari, Imam Suandari dan Imam Syahbudin. Rombongan tersebut dianggap sebagai elemen masyarakat yang pertama kali merayakan tabot di Bengkulu. Setelah kepergian rombongan Maulana Ichsad, selanjutnya dalam sejarah Bengkulu muncul nama Syekh Burhanuddin alias Imam Senggolo yang merupakan pimpinan para tukang yang membangun Benteng Marlborough (1718-1719). Para tukang tersebut berasal dari Madras dan Bengali bagian selatan India. Syekh Burhanuddin beserta rombongan juga merayakan ritual tabot. Selanjutnya tradisi tabot terus diwariskan

kepada anak cucu mereka yang diantaranya berbaur dengan masyarakat Bengkulu. Tradisi berkabung tersebut mengalami asimilasi dan akulturasi dengan budaya setempat dan kemudian diwariskan dan dilembagakan yang kemudian dikenal dengan sebutan upacara tabot.

Upacara Tabot ini sempat meluas dari Bengkulu ke Painan, Padang, Pariaman, Maninjau, Pidie, Banda Aceh, Meulaboh, dan Singkil. Namun, dalam perkembangannya berpacu dengan zaman, kegiatan Tabot menghilang dibanyak tempat. dan akhirnya hanya menyisakan di dua tempat, yaitu di Bengkulu dan di Pariaman. Di Bengkulu masyarakat setempat tetap mengenal dengan sebutan Tabot, sedang di Pariaman dikenal dengan sebutan Tabuik. Keduanya sama namun acara dan pelaksanaannya berbeda. (<http://visit-bengkulu-now-mei.wordpress.com/2012/06/08/tabot/>)

#### **2.4 Tinjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah serta sinkronasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara. Pada era orde lama, definisi APBD yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial work plan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan

pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran.

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo (2005:22), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Sedangkan menurut Bastian (dalam Damang, 2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **2.4.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otoritas : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sedangkan menurut Kunardjo (dalam Damang, 2011) menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Alokasi dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta
2. Fungsi Distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga Negara agar kesenjangan dan penerimaan pendapatan dapat dikurangi.
3. Fungsi Stabilitas adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Sementara itu D. J. Mamesah (1995:79) mengatakan, bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu perencanaan. Sebagai salah satu fungsi organik manajemen maka selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

#### **2.4.2 Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 5 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### **2.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 butir 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. PAD bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### **2.4.2.2 Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Perimbangan terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum; dan
  - c. Dana Alokasi Khusus.
2. Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

### **2.4.2.3 Lain-lain Pendapatan**

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu peluang daerah memperoleh pendapatan disamping Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Menurut Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 43 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pada pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan juga mengenai lain-lain pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat
2. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
3. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
4. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **2.4.2.4 Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda, (dalam Damang, 2011). Pengelompokan belanja daerah menurut Permendagri Nomor 27 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Bunga
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
  - e. Belanja Bagi Hasil Pajak
  - f. Belanja Bantuan Keuangan
  - g. Belanja Tidak Terduga
  
2. Belanja Langsung
  - a. Alokasi belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
  - b. Belanja Pegawai
  - c. Belanja Barang dan Jasa
  - d. Belanja Modal
  
3. Surplus/Devisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### **2.4.2.5 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi : sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun lalu; pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi : pembentukan dan cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan pemberian pinjaman daerah.

#### **2.4.3 Prinsip-prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

4. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah

D.J. Mamesah (1995:82) juga mengemukakan, bahwa dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) perlu ditambah empat prinsip lagi :

1. Prinsip kemandirian, dimana adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi.
2. Prinsip prioritas, dimana dalam penyusunan anggaran agar diupayakan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.
3. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, dimana pengendalian pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas daerah tersebut diatas.
4. Prinsip disiplin anggaran, dimana setiap dinas /lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggungjawabannya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia/ belum tersedia kredit anggarannya dalam APBD.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam upaya mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Penentuan tahap berikut teknik yang digunakan harus mencerminkan relevansi dengan fenomena penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau paradigma fenomenologi. Bog dan Taylor (dalam Moleong, 2002:4), mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan Krick dan Miller (dalam Moleong, 2002:3), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Moleong (2002:6), membuat ciri penelitian deskriptif ini berupa pengumpulan data seperti kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kejadian fakta dan data gejala sosial yang ada dilapangan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian jenis ini adalah penelitian yang melukiskan fakta atau karakteristik mengenai masalah penelitian yang diteliti dengan mengumpulkan informasi guna melukiskan gejala-gejala atau fenomena yang ada.

Berikut ini peneliti menampilkan desain penelitian yang dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Desain Penelitian**

<b>NO</b>	<b>DESAIN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	Masalah Penelitian	Bagaimana efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu?
<b>2</b>	Jenis Penelitian	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif
<b>3</b>	Fokus Penelitian	Efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.
<b>4</b>	Teknik Pemilihan Informan	Disini peneliti menggunakan teknik <i>snowball sampling</i> . Sampelnya adalah individu atau subjek pemberi informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.
<b>5</b>	Teknik Pengumpulan Data	Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada data <i>natural setting</i> (kondisi yang alamiah) yakni dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
<b>6</b>	Tim Peneliti	Peneliti terdiri dari satu orang yaitu mahasiswa yang bersangkutan yang sedang menyusun skripsi dengan judul ini
<b>7</b>	Teknik Analisis Data	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif berdasarkan teori Miles dan Huberman

### **3.2 Aspek Penelitian**

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui efektivitas festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Aspek penelitian adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel akan diukur sehingga memudahkan dalam pengukuran data yang diperoleh. Dalam tabel 3.2 akan dijelaskan mengenai aspek penelitian yang digunakan oleh penulis.

**Tabel 3.2**  
**Aspek-aspek penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Aspek Penelitian</b>	<b>Indikator Penelitian</b>
Efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu	Pelestarian wisata budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksistensi ritual tabot</li> </ul>
	Pengembangan ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi pedagang kecil</li> <li>• Kesejahteraan pelaku usaha saat festival tabot</li> </ul>
	Sarana promosi potensi pariwisata budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan objek wisata</li> <li>• Peningkatan kunjungan wisata</li> </ul>
	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata</li> </ul>

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Nantinya informasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran asumsi dan penilaian terhadap efektivitas kebijakan festival tabot dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini akan menggunakan teknik sampling snowball (*snowball*) dalam rangka menentukan informan. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya (Sugiyono, 2010:219). Artinya bahwa sampel dapat ditentukan ketika peneliti berada di lapangan, ketika peneliti belum mendapatkan data yang lengkap maka peneliti mencari sampel lain yang dapat memberikan data yang lebih banyak.

Dengan pendapat tersebut maka yang merupakan sasaran penelitian adalah individu atau subyek pemberi informasi berkaitan dengan data yang diperlukan berdasarkan pendapat Spradly (dalam Sugiyono, 2010:221) dalam penelitian ini penentuan informan tersebut dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkuntrulisasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar untuk diketahui juga di hayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai kesempatan/waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tergolong pada awalnya tergolong asing oleh peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan timbul informan lain yang lebih memahami dan mempunyai informasi dan data yang lengkap dan relevan.

Untuk responden dalam penelitian ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dimaksudkan agar informasi dan data lebih valid dan relevan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka sebagai acuan dasar yang dijadikan informan ditetapkan pada awal penelitian yakni setelah melakukan seleksi dan konfirmasi yang diperoleh, relevan atau tidak dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informan antara lain :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu

Dijadikan sebagai informan karena menangani secara langsung dana PAD dari penyewaan lapak dan tenda selama adanya kegiatan festival tabot, sehingga cocok dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

2. Staf/pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu

Dijadikan sebagai informan karena turut serta selama menjalankan proses festival tabot dilapangan, sehingga dapat dimintai informasi mengenai pelaksanaan kegiatan festival tabot.

3. Staf/pegawai bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.

Dijadikan sebagai informan karena turut mengelola APBD untuk penggunaan kegiatan festival tabot.

4. Keluarga Kerukunan Tabot (KKT) Kota Bengkulu

Dijadikan informan karena turut andil dalam pelaksanaan festival tabot Kota Bengkulu mulai tanggal 1-10 Muharram, sehingga dapat dimintai informasi mengenai perkembangan program tahunan tersebut.

## 5. Masyarakat Kampung Cina Kota Bengkulu

Dijadikan informan karena lokasi tempat tinggal atau tempat berdagang mereka yang berada tepat dilaksanakannya kegiatan festival tabot Kota Bengkulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada data *natural setting* (kondisi yang alamiah), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (dalam Sugiyono, 2010).

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2002), dimana sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan oleh penulis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian sebagaimana yang ditetapkan pada masing-masing variable dan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisa baik secara kuantitatif maupun kalitatif.

#### 2. Wawancara

Wawancara yang pertama dilakukan adalah wawancara informal, dimana pertanyaan tergantung pewawancara dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara informal ini hanya bersifata untuk menciptakan hubungan yang baik atau untuk mengurangi suasana yang kaku, selanjutnya baru dilakukan wawancara yang mendalam (*in-depth interviem*), pada penelitian wawancara mendalam ini dilakukan

terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang diamati.

### 3. Dokumentasi

Adapun pengumpulan data yang menggunakan dokumen yang dihasilkan dapat berupa peraturan dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan penulis meliputi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

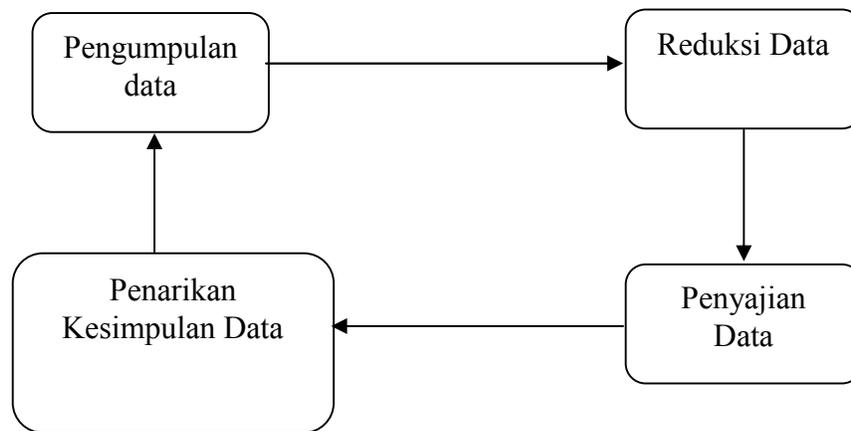
### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini setelah terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dimana hal itu dilakukan dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Menggunakan metode deskriptif yaitu untuk meneliti keadaan yang menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun data kemudian mengolah data. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan analisis deskriptif hanya menyajikan dan menganalisis data agar bermakna dan komunikatif.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 253) analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan

data dalam periode tertentu. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Berikut ini proses data yang dilakukan peneliti :



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2010)

Pada gambar diatas proses pengumpulan data di lapangan di temukan cukup banyak. Data diperoleh baik berupa dokumen, wawancara, gambar, foto, catatan di lapangan dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh terkumpul cukup banyak sehingga peneliti perlu melakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak penting. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang selanjutnya. Setelah data direduksi, data kemudian disajikan

peneliti secara jelas. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan data yang telah didapat.